

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional (HI) berkaitan dengan faktor-faktor dan kegiatan yang mempengaruhi kebijakan eksternal (Hoffman, 1977). Dengan demikian, HI berkaitan dengan semua transaksi pertukaran, aliran informasi, dan respons perilaku diantara masyarakat dan aktor didalamnya (Qais, 2018). Selama beberapa tahun terakhir sejak berakhirnya perang dunia II, konflik ataupun peperangan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia menyebabkan krisis kemanusiaan menjadi isu penting dalam HI. Krisis kemanusiaan sering dikaitkan dengan epidemi, kelaparan, dan migrasi. Krisis ini terjadi terutama di negara-negara berpenghasilan menengah kebawah, fungsi layanan sosial yang rendah, serta peristiwa *Arab Spring*. Kawasan *Middle East and North Africa* (MENA) telah memikul beban krisis kemanusiaan berkepanjangan dan terbesar selama peradaban dunia. MENA juga telah berhadapan dengan rantai perang regional terpanjang tiap dekade sejak pertengahan abad ke-20, sekarang mencakup hampir 75 tahun. Selain menjadi daerah konflik, krisis kekurangan gizi yang parah juga terjadi. Puluhan juta orang yang diambang kematian berjuang melawan kelaparan kronis di MENA (Kandeel, 2019).

Ada beberapa negara di kawasan MENA yang mengalami krisis kemanusiaan yang cukup parah. Di Yaman, krisis kemanusiaan ditandai dengan adanya kerusuhan serta pergolakan politik sehingga meningkatkan kekerasan dan menyebabkan Yaman menjadi negara termiskin di dunia Arab. Yaman kehabisan air dan bahan bakar, makanan semakin langka dan infrastruktur kesehatan sebagian besar tidak berfungsi. Sementara itu, konflik yang belum terselesaikan di Libya menyebabkan kekhawatiran di sektor keamanan pangan dan keruntuhan ekonomi. Sedangkan situasi konflik Suriah dengan cepat berkembang dari gerakan protes yang serupa dengan yang ada di Tunisia dan Mesir berubah

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY

JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjadi krisis hak asasi manusia (HAM) dengan konsekuensi kemanusiaan yang tinggi. Sementara kerangka perlindungan internasional dalam situasi kerusuhan sipil tidak jelas, penahanan sewenang-wenang yang meluas, menghambat akses ke layanan dasar, dan menghambat akses ke bantuan medis bagi yang terluka (Amiri, 2011).

Korban manusia dari konflik di MENA telah mencapai proporsi bersejarah. Sejak 2000, diperkirakan 60% kematian terkait konflik dunia telah terjadi di MENA (Saidi, 2018). Kawasan ini terus menghadapi perpindahan tingkat tinggi sepanjang tahun 2015. Dengan tiga sistem darurat di Irak, Suriah, dan Yaman, wilayah ini menyumbang lebih dari 30% dari migrasi global, termasuk 2,7 juta pengungsi, 13,9 juta pengungsi internal dan sekitar 374.200 individu tanpa kewarganegaraan (UNHCR, 2015).

Uni Eropa (UE) dihadapkan pada masalah krisis pengungsi pada tahun 2015, istilah krisis pengungsi mulai muncul di awal Januari hingga akhir April dikarenakan sekitar 1.710 orang tewas akibat serangkaian kecelakaan "hitam" di Laut Mediterania (Cymbranowicz, 2018). UE mengatakan bahwa kedatangan pengungsi ke Eropa menjadi salah satu fokus permasalahan kemanusiaan dan mereka bersedia untuk menyediakan suaka bagi para pengungsi (Avisia, 2017). Namun, tidak semua negara anggota UE memiliki pandangan yang sama dengan kedatangan pengungsi ini, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. UE memiliki sebuah kebijakan yang mengatur masalah penerimaan suaka dan imigran untuk diterapkan oleh negara-negara anggota UE yang disebut *Common European Asylum System* (CEAS) (Eflar, 2018). CEAS merupakan sistem yang membentuk standar-standar minimum dan prosedur yang jelas untuk memproses dan menghasilkan keputusan dari aplikasi setiap pencari suaka serta didukung dengan perlakuan yang jelas dan sesuai hukum internasional (Setiabudi, 2017). Kebijakan ini dibuat agar semua negara anggota ikut serta dalam melindungi pengungsi, hal ini merupakan bentuk kontribusi UE dalam menangani krisis pengungsi. Akan

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

**RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tetapi, dengan tingginya aliran pengungsi menyebabkan implementasi CEAS tidak dapat terlaksana secara optimal (EASO, 2017).

Sejak tidak ampuhnya CEAS sebagai landasan kebijakan pengungsi, UE membutuhkan penindakan darurat untuk krisis pengungsi. Pada tahun 2015 UE mengeluarkan *European Agenda on Migration*. Dengan fungsi sebagai langkah UE dalam upaya penanganan krisis pada jangka waktu pendek dan panjang. Dalam waktu pendek beberapa kebijakan Uni Eropa meliputi; (1) menyelamatkan pengungsi di laut (2) menangkap jaringan penyelundup (3) merelokasi pengungsi dan menyediakan pemukiman kembali di seluruh negara Uni Eropa (4) menjalin kerja sama dengan negara ketiga dalam menangkal akar migrasi serta membantu negara-negara Uni Eropa garis depan dalam mengatur kedatangan migrasi. Sedangkan untuk jangka panjang, kebijakan itu mencakup; (1) penurunan migrasi ilegal secara insentif (2) penyelamatan di laut dan pengamanan perbatasan eksternal (3) memperkuat kebijakan suaka Uni Eropa (4) pembuatan kebijakan migrasi legal (European commission, 2015).

Jerman adalah salah satu negara anggota UE yang menerima pengungsi secara terbuka. Aturan mengenai suaka dan pengungsi tercantum dalam *The Basic Law for the Federal Republic of Germany* pasal 16a tentang hak-hak dasar (Eflar, 2018). Dalam penerimaan pengungsi Jerman menggunakan pasal tersebut sebagai landasan. Lalu Kanselir Jerman, Angela Merkel, berpegang pada motto pragmatismenya yang positif: “*We can do this*” (*Wir schaffen das*) dalam menghadapi krisis pengungsi yang terjadi. Perang di Timur Tengah, terutama Suriah, membuat pemerintah Jerman tergerak untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang dipimpin oleh kanselir Merkel. Jerman merupakan negara pemberi suaka terbanyak dibandingkan dengan negara Eropa lainnya (Salsabila, 2019). Jerman tidak berada di garda terdepan dalam penerimaan gelombang pengungsi karena letak geografisnya yang berada di tengah benua Eropa. Tidak seperti Italia dan Yunani yang menjadi “jembatan” bagi para pengungsi untuk

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY

JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN

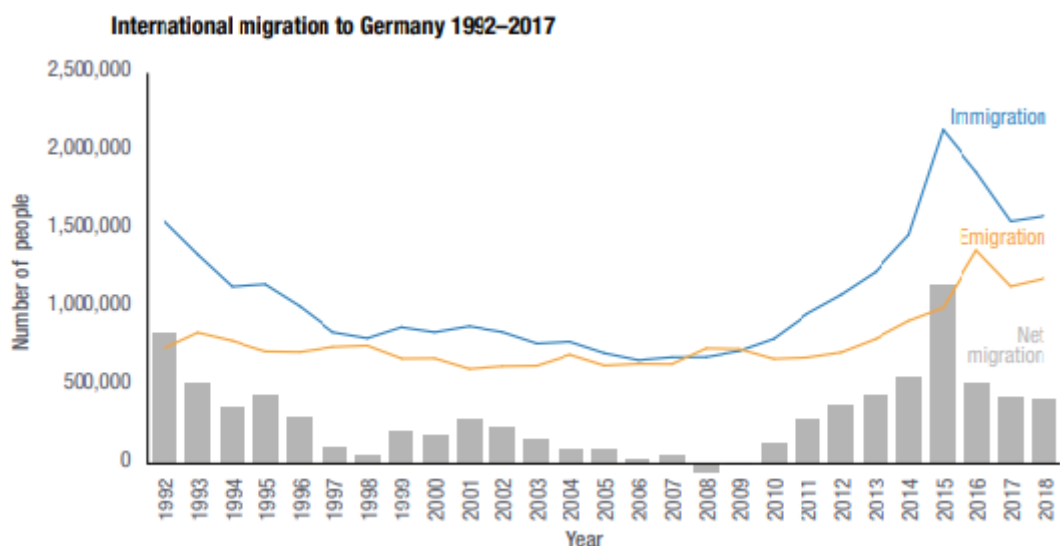
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dilewati. Namun Jerman, bersama dengan Swedia, menjadi haluan dari kebanyakan para pengungsi dengan alasan kebijakan terhadap pengungsi yang lebih terbuka dan tanpa batas. Pada tahun 2014 dan 2015 Jerman dan Swedia menerima bagian terbesar dengan 36% pengungsi (diikuti oleh Hongaria dan Swedia, masing-masing 13% dan 12%) (Setiabudi, 2017).

Imigrasi mencapai klimaks pertama di Jerman saat reunifikasi pada tahun 1992. Selama tahun itu, lebih dari 1,5 juta orang berimigrasi ke Republik Federal Jerman, sementara 720.000 meninggalkan negara itu. Hasilnya migrasi bersih sekitar 782.000. Selama tahun-tahun berikutnya, imigrasi menurun secara signifikan. Secara statistik, Jerman adalah negara emigrasi pada tahun 2008 dan 2009 dimana jumlah orang yang meninggalkan negara itu lebih tinggi daripada mereka yang datang dari luar negeri. Sejak 2010, masuknya migran telah meningkat lagi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, imigrasi berada pada titik tertinggi dalam sejarah Republik Federal Jerman terutama karena gelombang besar pencari suaka pada tahun 2015 (Hanewinkel V. , 2018).

Gambar 1.1 Grafik arus migrasi internasional yang ke Jerman pada tahun 1992-2017



sumber: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12970.pdf>

Jika dilihat dari gambar, pada tahun 2015, terdapat 2,14 juta orang bermigrasi ke Jerman, sementara sekitar 998.000 orang meninggalkan negara itu selama periode yang sama. Ini menghasilkan surplus migrasi sekitar 1,14 juta orang. Jumlah pencari perlindungan di Jerman menurun ditahun 2016 sekitar 746.000 orang mengajukan permohonan suaka lalu di tahun 2017 diajukan sekitar 223.000 permohonan suaka, dalam periode Januari – April 2018 jumlahnya sekitar 64.000 (tatsachenueberdeutschland.de). Pada tahun 2018 para pengungsi dan migran lain membentuk sekitar 13% dari populasi Jerman, 1,2 juta di antaranya (11%) adalah pengungsi. Lebih dari 307.000 dipekerjakan pada tahun 2018. Mayoritas kelompok ini berusia di bawah 35, dan lebih dari dua pertiganya membayar kontribusi jaminan sosial (Mosel, Smart, Foresti, Hennessy, & Leach, 2019). Jerman berusaha mencari solusi bersama untuk masalah pengungsi di Eropa dalam semangat solidaritas. Selain itu, pemerintah aktif dalam memberi sumbangan dan bantuan untuk negara penampung demi perbaikan perlindungan bagi pengungsi ataupun migran.

Para migran yang datang ke Jerman sebagian besar langsung menuju ke kota-kota besar seperti Berlin, Munich, Hannover dan Hamburg, untuk bermukim secara lokal. Hal ini merupakan pilihan pribadi dari para pendatang baru sebagai kesempatan untuk bertemu dengan kenalan dan keluarganya. Disamping itu, hal ini merupakan strategi alokasi pemerintah Jerman yang mendukung lokasi dengan populasi yang cukup besar untuk pembagian pendapatan pajak. Tetapi, wilayah yang besar dan padat penduduk mungkin tidak memberikan pilihan terbaik, baik untuk migran atau untuk penduduk Jerman secara keseluruhan (The Economist, 2016). Sebagian besar populasi di Jerman terletak pada kelompok usia yang lebih tua, serta memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Ini menggambarkan populasi yang menyusut setiap hari. Dengan demikian, migran menjadi ‘sumbangan’ yang

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

***RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

cukup besar bagi perkembangan dibidang kemasyarakatan dan perekonomian di Jerman karena kebutuhan akan tenaga terampil terus meningkat alhasil banyak migran yang terlatih datang ke Jerman (Salsabila, 2019).

Sambutan Kanselir Merkel “*welcome culture*” terhadap migran sejalan dengan adanya kebijakan *open door policy* Jerman. Kebijakan pintu terbuka adalah istilah urusan luar negeri dengan membuka perbatasan untuk migran tanpa proses pemindaian atau deteksi (Sinambela, 2017). Kebijakan tersebut menawarkan perlindungan masal kepada pengungsi, khususnya pengungsi Suriah. Kebijakan ini secara khusus diiringi dengan langkah konkrit untuk mempercepat integrasi migran dalam masyarakat Jerman. Demokrasi dan HAM tetap menjadi agenda utama dalam kebijakan Jerman dengan fokus pada negara atau kawasan yang terancam (KBRI Berlin, 2017).

Penerapan kebijakan *open door policy* untuk menghadapi krisis migran yang terjadi di Eropa, sebuah harapan baru di Jerman untuk meningkatkan citra positif Jerman. Beberapa orang Jerman berharap citra positif ini akan membantu menghilangkan beberapa noda di masa lalu terhadap reputasi Jerman. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa sekarang Jerman telah menjadi rumah bagi migran di mana Jerman pernah menghasilkan ratusan ribu orang migran (Sinambela, 2017). Selain itu, pemerintah juga memberikan banyak kenyamanan setelah mereka memasuki Jerman, seperti perumahan sementara, upah harian, izin kerja, dan pelatihan bahasa (Li, 2016).

Pemerintah Jerman mendapat kritik keras akan kebijakannya tersebut, terutama dari rakyatnya sendiri dan kebijakan *open door policy* makin membuat kegelisahan publik meningkat. Studi terbaru, yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Universitas Bielefeld, menunjukkan bahwa sebanyak 54,1% responden di Jerman menyatakan mereka khawatir dan memiliki pandangan buruk akan kedatangan pengungsi. Setelah puncak gelombang migrasi, di tahun 2016, survei menunjukkan 49,5% orang berpendapat negatif tentang pencari suaka

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

**RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(Deutsche Welle, 2019). Angka ini membuktikan bahwa masyarakat Jerman semakin terpecah pada topik imigrasi. Kondisi struktural sosial Jerman juga semakin memburuk karena jumlah serangan dan kekerasan terhadap migran semakin meningkat.

Banyak orang Jerman menjadi waspada terhadap perubahan demografis dan perubahan sosial yang cepat. Setelah awalnya menunjukkan sambutan yang sangat ramah terhadap arus masuk pengungsi dan migran, pemerintah Jerman dan rakyatnya harus menghadapi kenyataan yang pahit, seperti yang tersirat dalam kalimat Presiden Joachim Gauck, “Hati kita lebar, tetapi kapasitas kita terbatas”. Sebagai konsekuensinya, dan sejalan dengan negara-negara tetangganya di Eropa, Jerman telah memperketat hukum suaka, dan undang-undang integrasi baru telah dirancang dengan tujuan melindungi nilai-nilai Jerman seperti yang didefinisikan oleh Konstitusi¹ (Müller, 2016). Menurut sosiolog Jerman, Hans-Georg Soeffner “Jika kita tidak memberikan pengetahuan tentang bahasa dan budaya kita, kita akan segera menghadapi konflik budaya - konflik yang dibentuk oleh agama-agama lain yang dibawa oleh para pengikutnya berimigrasi ke Jerman.” (Knipp, 2015). Penduduk Jerman yang menyambut pengungsi masih bahu-membahu mengajar bahasa, budaya, dan menampung anak-anak pengungsi tanpa orang tua, atau membantu mencari pekerjaan. Tanpa bantuan ribuan warga, arus pengungsi tidak akan terorganisir dengan baik. (Spasvoska, 2016).

Akan tetapi hal itu tidak berjalan dengan mulus, adanya serangan balik ke sikap “pengungsi menyambut” segera terwujud, dan sikap anti-imigran meningkat secara terukur. Bangkitnya *Patriotische Europaer Gegen die Islamisierung Des Abndlandes* (PEGIDA), sebuah gerakan protes anti-islam, menandai satu ekspresi nyata pada tahun 2014 bahkan sebelum krisis pengungsi dan migrasi muncul pada

¹ Konstitusi Jerman menjamin hak asasi atas suaka bagi korban persekusi politik. Dengan jaminan itu Jerman menegaskan tanggung jawab historis dan humaniternya.

tahun 2015. PEGIDA didirikan di Dresden yang berawal dari jalanan, alun-alun hingga tercipta dinamika yang luar biasa. Lalu menjadi sorotan internasional karena penolakannya yang terang-terangan terhadap Muslim dan imigran, dikombinasikan dengan penghinaan terbuka terhadap para elit politik dan jurnalis yang disebut pendukungnya sebagai kebohongan pers². Kelompok ini menyebarkan sentiment anti pencari suaka dan anti-islam. Sementara dukungan untuk menyambut pengungsi melemah lalu gerakan ini mengorganisir berbagai aksi unjuk rasa dan propaganda Islamophobia hingga menyebar ke kota-kota Jerman lainnya sampai ke luar perbatasan negara dan muncul di negara-negara Eropa seperti Swedia, Denmark, Austria, dan Perancis.

Menurut dinas intelijen internal Jerman, tumbuhnya sentimen anti-imigran juga tercermin dalam kebangkitan mereka. Walaupun bertahun-tahun menurun, dukungan bagi para ekstremis tumbuh lagi, dengan sekitar 23.000 pada tahun 2016, sampai berorientasi pada kekerasan. Hanya dalam waktu satu tahun, serangan sayap kanan terhadap tempat perlindungan suaka meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 170 pada tahun 2014 menjadi hampir 900 pada tahun 2015, dan serangan pembakaran terhadap tempat perlindungan suaka meningkat dari 5 menjadi 75 selama periode yang sama (Müller, 2016).

Jerman memiliki sejarah yang sangat kontroversial, maka dari itu Jerman enggan untuk mempublikasikan rasa nasionalismenya secara terang-terangan, sangat disayangkan hal tersebut tidak mendapatkan hasil yang baik bahkan meninggalkan bayangan, gelombang populis melanda Jerman. Sebuah partai populis sayap kanan pun lahir, *Alternative für Deutschland (AfD)*. Partai politik ini didirikan pada tahun 2013 dan dasar dari platformnya adalah *Euroscepticism*, yang merupakan gerakan kuat untuk menentang UE. Seiring berjalannya waktu ditambah adanya masalah dengan imigran, partai politik ini mulai mengalihkan

² sebuah istilah Nazi untuk memfitnah media

fokusnya. Dalam aliansi informal politik identitas antara PEGIDA dan AfD, gerakan dan partai, bahwa PEGIDA dan AfD memiliki sedikit kesamaan. Kekuatan populis sayap kanan ini terbentuk karena penolakan imigrasi, ketidakpercayaan terhadap agama Islam, kritik terhadap politik dan media. Serta ketidakpuasan terhadap demokrasi liberal dan representatif (Rensmann, 2018). Meskipun Jerman memiliki ekonomi yang kuat dan kapasitas untuk para pengungsi ini, meningkatnya resistensi terhadap keputusan Kanselir telah memberi AfD dan PEGIDA sebuah celah untuk memperluas ideologi populis mereka dan menambah agenda *xenophobic* mereka.

Xenofobia telah menjadi fenomena di kalangan masyarakat Jerman dan migran disebut oleh beberapa orang sebagai parasit sosial dan disalahkan dalam berbagai hal mulai dari sumber penyakit, hilangnya identitas nasional hingga hilangnya tempat kerja. Bertambahnya keragaman etnis dan ras masyarakat merupakan konsekuensi dari penerimaan arus migrasi. Meningkatnya migrasi berarti semakin banyak negara yang menjadi multikultur, disamping itu negara tersebut harus menghadapi masyarakat dari berbagai budaya, ras, agama dan bahasa. Mengatasi realitas peningkatan keragaman berarti menemukan mekanisme politik, hukum, sosial dan ekonomi untuk memastikan saling menghormati dan memediasi hubungan antar perbedaan (Miller, 2018).

Imigran atau orang asing berdiri di tempat di mana identitas, rasisme dan praktik kekerasan direproduksi. Rasisme dan xenofobia adalah fenomena yang berbeda, meskipun sering disamakan. Rasisme umumnya menyiratkan perbedaan berdasarkan perbedaan karakteristik fisik, seperti warna kulit, jenis rambut, fitur wajah, dll. Sedangkan xenofobia menunjukkan perilaku yang secara khusus didasarkan pada persepsi bahwa yang lain adalah asing atau berasal dari luar komunitas atau bangsa. Seperti yang dikatakan seorang sosiolog, xenofobia adalah "orientasi sikap permusuhan terhadap non-pribumi dalam populasi tertentu." (UNHCR, 2001). Imigran serta etnis minoritas, sering dikecualikan dari

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

**RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kehidupan publik, terkena diskriminasi, atau diusir. Seperti yang terjadi di Berlin pada tahun 2019 adanya penyerangan terhadap perempuan Muslim secara verbal dan fisik oleh kelompok xenofobia. Perempuan tersebut mengatakan kepada polisi bahwa seorang pria mengeluarkan ejekan bernada rasis dan menyerangnya di stasiun metro *Greifswalder*, lalu pelaku memberi tanda hormat Nazi sebelum melarikan diri. Serangan seperti ini menargetkan orang-orang yang menggunakan atribut keagamaan, seperti perempuan Muslim berhijab atau orang Yahudi yang menggunakan kippah (Şimşek, 2019).

Penulis melihat bahwa xenofobia telah menjadi perhatian dunia sejak lama dan menjadikannya sebagai salah satu tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Isu kemanusiaan seperti ini memiliki daya tarik tersendiri karena masih melekatnya warisan historis kelam membuat sebagian masyarakat Jerman lupa untuk menjadi manusia. Kebijakan *open door policy* telah menimbulkan resistensi dari kelompok xenofobia bahwa mereka menganggap kalau kebijakan *open door policy* merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Dengan tumbuhnya kelompok xenofobia sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat membuat aktor-aktor tertentu menikmati panggunya. Jika hal ini terus dibiarkan cenderung akan menyebabkan banyak luka dan tindak kekerasan terhadap migran meningkat, lalu akan makin sulit dihadapi. Maka dari itu penulis menggunakan demokrasi kosmopolitan dalam melihat respons dari kelompok xenofobia. Xenofobia harus segera diatasi agar *The Basic Law for the Federal Republic of Germany* pasal 16a tentang hak-hak dasar migran bisa berjalan dengan optimal. Disisi lain, kelompok xenofobia tidak ingin dan tidak tahu caranya berasimilasi, sehingga kebijakan Jerman yang menekankan bahwa Jerman merupakan negara multikultur sangat sulit untuk diterima. Penulis melihat fenomena ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah Jerman dalam menyelenggarakan negara yang demokratis dan terbuka serta menjunjung tinggi kemanusiaan.

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

**RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian ini termasuk kedalam lingkup internasional karena membahas migrasi dimana para migran melintasi berbagai negara, kawasan, dan benua. Selain itu, migasi melibatkan antara satu komunitas dengan komunitas lain yang beda negara. Sehingga dua komunitas ini bisa dianggap sebagai interaksi antar aktor dalam HI. Dalam penelitian ini melibatkan kebijakan UE dan pemerintah Jerman dalam mengatasi krisis kemanusiaan MENA yang mana hidupnya terancam karena konflik sehingga menimbulkan tanggung jawab dari masyarakat di wilayah atau negara lain untuk berpartisipasi dalam membantu. *Open door policy* merupakan kebijakan yang bersifat hubungan internasional karena melibatkan unsur eksternal. Sehingga ada dua aktor yang terlibat yaitu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan migran itu sendiri. Skripsi ini akan membahas mengenai krisis kemanusiaan, kebijakan pemerintah Jerman, dan kemunculan kelompok xenofobia di Jerman.

1.2. Rumusan Masalah

Krisis migran telah menyita perhatian masyarakat global, arus migrasi di Eropa diatasi dengan adanya kebijakan *open door policy* Jerman dan didukung oleh kebijakan CEAS UE serta *European Agenda on Migration 2015*. Jerman merupakan negara demokrasi yang menjunjung HAM maka dari itu masyarakat Jerman seharusnya dapat menerima migran dengan tangan terbuka. Namun yang terjadi, munculnya kelompok xenofobia sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran migran dan kebijakan *open door policy*, maka dari itu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana respons kelompok xenofobia terhadap implementasi kebijakan *open door policy* Jerman dalam perspektif demokrasi kosmopolitan?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

**RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Untuk memberikan informasi mengenai respons kelompok xenofobia di Jerman terhadap implementasi kebijakan *open door policy* di Jerman
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung peningkatan xenofobia di Jerman

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan pembaca bahwa kebijakan *open door policy* Jerman telah menimbulkan resistensi di dalam masyarakatnya. Resistensi yang dibuat oleh kelompok xenofobia yang diskriminatif dan melanggar HAM telah menimbulkan perhatian masyarakat dunia. Selain itu, agar pembaca memahami wawasan mengenai perilaku xenofobia yang sejak lama sudah beredar, namun hingga kini masih ada keberadaannya dan tersebar di seluruh dunia. Maka dari itu penelitian ini memiliki manfaat agar menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan berguna untuk membuat perubahan maupun pencegahan.

2. Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai respons kelompok xenofobia yang ada di Jerman terhadap migran.
2. Penelitian ini berguna agar dapat mengeleminasi sikap xenofobia yang ada di dunia terutama di negara multikultur.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran dan pemahaman mengenai isi skripsi secara menyeluruh, penulis membagi skripsi ini dalam lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

*RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bagian pertama ini berisi uraian tentang latar belakang krisis MENA dan migran, kebijakan *open door policy* Jerman, hingga keresahan penduduk Jerman lalu munculnya kelompok xenofobia yang menjadi tantangan Jerman sebagai negara demokrasi. Di bab ini juga terdapat rumusan masalah yang berasal dari latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini meliputi pembahasan mengenai kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang sejenis atau beririsan yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan peneliti ambil. Lalu bersamaan dengan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis serta alur pemikiran dan asumsi dasar penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga membahas mengenai teknik penggunaan yang akan digunakan oleh peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bagian keempat berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Terdiri dari beberapa sub-bab, tergantung hasil penelitian. Bab ini akan berusaha menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penulis akan membahas mengenai dinamika migrasi di Jerman, sejarah perkembangan migrasi, kemunculan xenofobia, penolakan kelompok xenofobia terhadap kebijakan *open door policy* dari sudut pandang demokrasi kosmopolitan. Pencarian jawaban akan ditelusuri menggunakan teori dan konsep yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Jauzaa Anandya Rizki, 2020

**RESPONS KELOMPOK XENOFobia TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY
JERMAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI KOSMOPOLITAN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Bab ini memuat hasil kesimpulan penelitian yang diharapkan mampu mencakup seluruh konten penelitian, kemudian terdapat saran sebagai rekomendasi dan harapan terkait permasalahan.